

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Era reformasi akuntansi sektor publik berdampak adanya tuntutan masyarakat akan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas mendorong pemerintah meningkatkan kinerja untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Bastian, 2010:5). Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah memberikan informasi atas kegagalan atau keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan kepada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan laporan tersebut (Aminah dkk., 2019).

Opini yang diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas penyajian laporan keuangan dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas pelaporan keuangan. Opini merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh auditor mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang diperiksa. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) berisi informasi mengenai laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran(Suhardjo, 2019). Tujuan dibuat laporan keuangan adalah untuk membantu para pihak yang membutuhkan informasi atas pengelolaan keuangan pemerintah yang relevan. Laporan keuangan yang tidak berkualitas dapat mempengaruhi keputusan pihak-pihak yang menggunakan laporan tersebut.

Laporan keuangan yang berkualitas dapat mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan bentuk pencapaian keberhasilan keputusan atas tujuan yang telah di

rencanakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 ada empat karakteristik laporan keuangan yang berkualitas yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Relevan yaitu informasi di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan cara mengevaluasi permasalahan masa lalu dan memprediksi masa depan. Andal yaitu laporan keuangan berisi informasi yang tidak menyesatkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan juga harus dapat dibandingkan dengan tujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja entitas di periode saat ini dengan periode sebelumnya. Selain itu, laporan keuangan juga harus dapat dipahami yaitu penyajian laporan keuangan disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna laporan keuangan sehingga pengguna laporan dapat memahami informasi di laporan keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga yang melakukan audit keuangan dan melakukan penilaian terhadap laporan keuangan pemerintah. Penilaian BPK RI dinyatakan dengan 4(empat) opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mengalami peningkatan, namun masih terdapat LKPD yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). LKPD yang belum memperoleh opini WTP dikarenakan masih terdapat akun-akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan tidak didukung dengan bukti yang cukup (IHPS, 2020).

Hasil pemeriksaan dari 541 LKPD tahun 2019 yang dilakukan oleh BPK menyatakan bahwa 485 (90%) LKPD memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan 50 (9%) LKPD memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 6 (1%) LKPD memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Adanya tuntutan masyarakat akan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel mendorong pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan keuangan yang berkualitas merupakan hasil dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak mudah, namun fakta menunjukkan bahwa terdapat sedikit kelemahan yang ditemukan oleh BPK dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah (IHPS, 2020). Pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pati menunjukkan bahwa laporan hasil audit BPK mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Hal ini di dukung oleh pemerintah daerah yang dengan cepat menindaklanjuti masukan BPK atas koreksi untuk melakukan perbaikan, sehingga laporan keuangan disajikan dan diungkap sesuai dengan SAP (Patikab.go.id). Hal ini dapat dilihat pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester I Tahun 2020.

**Tabel 1. 1**  
**Opini BPK atas Laporan Keuangan**  
**Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2015 - 2019**

No	Entitas Pemerintah Daerah	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kabupaten Pati	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)

Untuk menciptakan laporan keuangan yang baik ada beberapa faktor yang diperlukan yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi aparatur pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, audit internal, dan sistem pengendalian internal yang memadai.

Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Menurut permendagri No. 59 tahun 2007 sistem akuntansi keuangan daerah merupakan keseluruhan proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan atas pengelolaan keuangan APBD. Sistem akuntansi menjadi sangat penting karena dapat membantu menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Sistem akuntansi keuangan yang memadai dapat mempermudah pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah (2019), Pravasanti(2019) dan Wineh dkk., (2019) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penelitian Suhardjo (2019) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor yang kedua adalah kompetensi aparatur pemerintah. Kompetensi aparatur pemerintah merupakan kemampuan seseorang menyelesaikan tugas di dalam pemerintahan secara efektif dan efisien sesuai dengan kewenangannya masing-masing(Pravasanti, 2019). Kompetensi aparatur pemerintah dapat membantu menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, karena individu yang berkompeten memiliki pemahaman akuntansi yang baik. Penelitian Fauziyah



(2019) menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Pebriani (2019), Wineh dkk., (2019), Elfauzi dan Sudarno (2019) dan Herzeqovina dkk., (2019) menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian Inapty dkk., (2016), Pravasanti (2019), dan Suhardjo (2019) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan teknologi untuk membantu mempercepat proses pengolahan data dan penyajian laporan keuangan pemerintah (Pravasanti, 2019). Pemerintah wajib mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi agar penyajian laporan keuangan dapat dilakukan secara cepat dan tepat serta berkualitas. Penelitian Pebriani (2019), Pravasanti (2019), dan Wineh dkk., (2019) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Fauziyah (2019) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor yang terakhir adalah sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mengukur kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien (Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008). Penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah (2019) menyatakan sistem

pengendalian internal dapat memoderasi sistem akuntansi keuangan daerah tetapi tidak dapat memoderasi kompetensi aparatur pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Pebriani (2019) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dapat memoderasi kompetensi aparatur pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi tetapi tidak dapat memoderasi peran audit internal.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fauziyah (2019) yang meneliti tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi daerah, kompetensi aparatur pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi. Namun terdapat beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian Fauziyah (2019). Perbedaan yang pertama adalah penambahan satu variabel independen yaitu peran audit internal yang diprediksi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Audit internal merupakan kegiatan untuk memeriksa pengelolaan keuangan dan tanggungjawab pemerintah atas kinerja yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pebriani (2019) dan Herzeqovina dkk., (2019) yang menyatakan bahwa peran audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang dimoderasi oleh sistem pengendalian internal, Berbeda dengan Wineh dkk., (2019) menyatakan bahwa peran audit internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dimoderasi oleh sistem pengendalian internal. Alasan variabel peran audit internal ditambahkan dalam penelitian ini karena dengan adanya pemeriksaan secara

berkala di lingkup internal pemerintahan maka dapat mengurangi risiko terjadinya kecurangan(*fraud*) dalam proses pelaporan keuangan. Audit internal juga merupakan indikator penting untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Jika kinerja pemerintah daerah baik maka kualitas laporan keuangan akan baik dan tidak berpotensi menyesatkan.

Perbedaan yang kedua yaitu objek penelitian, penelitian Fauziyah (2019) menggunakan objek organisasi perangkat daerah di Kota Serang, sedangkan penelitian ini menggunakan objek penelitian organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pati. Alasan perbedaan objek penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang berbeda pada pemerintahan setiap daerah atas pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil judul **"Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pati)".**

## **1.2 Ruang Lingkup**

Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kompleks, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Penelitian ini dibatasi dengan permasalahan yang akan dikaji, maka ruang lingkup penelitian ini terbatas pada hal-hal berikut:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaituvariabel dependen adalah kualitas laporan keuangan(Y), variabel

independen adalah sistem akuntansi keuangan daerah( $X_1$ ), kompetensi aparatur pemerintah( $X_2$ ), pemanfaatan teknologi informasi( $X_3$ ), peran audit internal( $X_4$ ). Variabel Moderasi adalah sistem pengendalian internal( $Z$ ).

2. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah organisasi perangkat daerah Kabupaten Pati.

### 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, pengelolaan keuangan di Indonesia dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel. Ukuran akuntabilitas laporan keuangan dilihat dari opini yang diberikan oleh BPK RI sebagai audit eksternal. Hasil audit BPK RI periode 2014-2019 menunjukkan bahwa pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Pati mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian dan di tahun 2015 sampai 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dari opini di tahun 2014 yaitu dari Opini Wajar Dengan Pengecualian menjadi Opini Wajar Tanpa Pengecualian, untuk mempertahankan opini tersebut pemerintah Kabupaten Pati harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi aparatur pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, peran audit internal, dan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan antara variabel dependen dan independen.



#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan pendekatan teori *stewardship*. Teori *stewardship* menjelaskan pemerintah sebagai penerima amanah tidak termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih mengutamakan kepentingan untuk organisasi. Pengungkapan laporan keuangan yang berkualitas diharapkan menjadi motivasi pemerintah untuk menyajikan informasi yang berkualitas bagi organisasi dan pengguna tanpa adanya tujuan untuk kepentingan individu. Tujuan teori *stewardship* di dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi aparatur pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan peran audit internal dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi.

#### 1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
  - b. Bagi Mahasiswa, dapat memberikan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi aparatur

pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan peran audit dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderasi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa, dapat mengimplementasikan teori yang didapat dari perguruan tinggi melalui penyusunan tugas akhir skripsi.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pemerintah mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini mampu dijadikan bahan penilaian apakah pengelolaan keuangan daerah sudah akuntabel atau belum.

